



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah berkat rahmatNya Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan II tahun 2019 dapat disusun sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2019 ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama yang mewajibkan unit organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan II Tahun 2019, kami menyusun Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan II untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome. Penyusunan LKj Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi juga



dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mudah-mudahan, penyajian LKj Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan II Tahun 2019 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama Triwulan II agar dapat melaksanakan kinerja pada Triwulan berikutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi di masa mendatang agar lebih produktif, efisien dan efektif.

Bukittinggi, Juli 2019

Kepala,

H. Abrar Munanda, MAg
NIP. 197105141995031001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 13 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang ORTAKER Kedudukan dan tugas, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi :

1. Memberikan pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat;
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid, serta urusan agama, pendidikan agama dan bimbingan masyarakat Kristen, Katolik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan Umrah;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan pendidikan Raudhatul Athfal, madrasah, pendidikan agama dan keagamaan serta pondok pesantren;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Penguatan tata kelola pemerintahan.



Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tersebut diarahkan pada upaya memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika, pembinaan akhlak mulia dan orientasi serta motivasi yang menjadi daya dorong dalam upaya mewujudkan masyarakat Bukittinggi sebagai Kota yang religius, aman, damai dan sejahtera.

Selain itu, pembangunan agama juga memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat dan bangsa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap realitas multikultural dan memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat Kota Bukittinggi yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam melaksanakan fungsi utama di atas Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melaksanakan 6 Program sejalan dengan diterapkannya restrukturisasi penganggaran yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah;
3. Program Pendidikan Islam;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik.

Capaian Kinerja yang diperoleh Triwulan II Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berdasarkan sasaran program secara rata-rata keseluruhan dalam



Tahun 2019 adalah **52 % (Lima Puluh Dua Persen)** dengan rincian sebagai berikut :

**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
pada Sub Bagian Tata Usaha**

1. Sasaran Strategis, Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian, Capaian Kinerja 0 %
2. Sasaran Strategis, Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan BMN, Capaian Kinerja 53 %
3. Sasaran Strategis, Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana, Capaian Kinerja 0 %
4. Sasaran Strategis, Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Perencanaan, Capaian Kinerja 76 %
5. Sasaran Strategis, Meningkatnya Kualitas Administrai Umum, Capaian Kinerja 49 %
6. Sasaran Strategis, Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Capaian Kinerja 68 %

Program Bimbingan Masyarakat Islam, seksi Bimas Islam

1. Sasaran Strategis, Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah, Capaian Kinerja 11 %
2. Sasaran Strategis, Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat dan wakaf, Capaian Kinerja 0 %
3. Sasaran Strategis, Pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam, Capaian Kinerja 79 %
4. Sasaran Strategis, Pengelolaan urusan Agama Islam dan pembinaan syariah, Capaian Kinerja 0 %
5. Sasaran Strategis, Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Islam, Capaian Kinerja 58 %



Program Pendidikan Islam

1. Sasaran Strategis, Peningkatan Mutu dan Relevansi pada PAIS, Capaian Kinerja 38 %
2. Sasaran Strategis, Meningkatnya Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah, Capaian Kinerja 45 %
3. Sasaran Strategis, Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Capaian Kinerja 40 %
4. Sasaran Strategis, Tersedianya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, Capaian Kinerja 84 %

Program Bimbingan Masyarakat Katolik

1. Sasaran Strategis, Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik, capaian kinerja 42 %
2. Sasaran Strategis, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik, capaian kinerja 42 %

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

1. Sasaran Strategis, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen, capaian kinerja 34 %

Program Penyelenggara Haji dan Umrah

1. Sasaran Strategis, Meningkatnya Pelayanan Haji Dalam Negeri, Capaian Kinerja 19 %
2. Sasaran Strategis, Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Haji, Capaian Kinerja 50%
3. Sasaran Strategis, Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Sasaran Strategis 0 %
4. Sasaran Strategis, Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Capaian Kinerja 51 %



Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. **21.830.626.000,-** (Dua puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan realisasinya Rp. **11.260.166.484,-** (Sebelas milyar dua ratus enam puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), (**52 %** dari alokasi anggaran).

Secara umum dari sasaran, program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan II Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan diharapkan pada Triwulan berikutnya semua kegiatan yang terdapat pada sasaran akan terlaksana dengan baik dan efektif.

Bukittinggi, Juli 2019
Kepala,

H. Abrar Munanda, MAg
NIP. 197105141995031001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis.....	4
D. Struktur Organisasi.....	7
E. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja.....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. Penetapan Indikator kinerja.....	47
B. Sistem Pengumpulan Data Kinerja	50
1. Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja 2018.....	51
2. Sasaran Program pada Seksi Bimas Islam	52
3. Sasaran Program pada Pendidikan Islam	54
4. Sasaran Program pada Seksi Haji Haji dan Umrah.....	56
5. Sasaran Program pada Subag Tata Usaha.....	57
6. Sasaran Program pada Bimas Kristen	59
7. Sasaran Program pada Bimas Katolik.....	60
C. Analisis Capaian Kinerja.....	61
D. Akuntabilitas Keuangan	65
BAB IV : PENUTUP	70
LAMPIRAN:	
Matrix Laporan Capaian Kinerja Periode Triwulan II	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya.

Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang untuk periode tahun 2005-2025 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" dan untuk tahun 2015 Visi Indonesia adalah mengacu kepada *Millenium Development Goals* (MDG's), Gambaran masyarakat di Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan Negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat yang setinggi-tingginya di seluruh Republik Indonesia.

Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang optimal dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Nasional, Renstra Kementerian Agama, dan Renstra Kementerian Agama Kota Bukittinggi serta seluruh sator/satker Kementerian Agama menyusun rencana strategis (Renstra) setiap lima tahun sekali sehingga di capai tujuan yang obyektif, terukur, dan tepat sasaran.

Renstra dijabarkan lebih lanjut dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap setahun sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan. Sedangkan hasil pencapaian sasaran, kemudian dilaporkan dan di evaluasi melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) setiap Triwulan.

Keputusan Menteri Agama Nomor 702 tahun 2016 tentang pedoman perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja pada Kementerian Agama merupakan pedoman dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) tiap Triwulannya dan Perjanjian Kinerja yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tupoksi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan*).

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ortaker Kanwil dan Kemenag, maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan



Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Bukittinggi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Visi, Misi serta kebijakan teknis dibidang Pelayanan dan Bimbingan kehidupan beragama di Kota Bukittinggi;
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan dibidang Bimbingan Masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama bimbingan masyarakat, Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
4. Pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama;



5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama di Kota Bukittinggi;

C. Aspek strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi memaksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya



tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan lampiran Perpres Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tersebut, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial. Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Prioritas yang menjadi tanggung jawab dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah prioritas bidang pendidikan dan prioritas yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan. Selain itu



Kementerian Agama juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

Berkaitan dengan pencapaian target prioritas dalam RPJMN Tahun 2015-2019, maka ditetapkan pokok-pokok strategi dan kebijakan Kementerian Agama Tahun 2015-2019 yang difokuskan pada 6 bidang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan beragama, agar terwujud suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional tanpa membedakan untuk memandang bahwa perbedaan bukan untuk diperdebatkan tetapi sebagai sesuatu kekayaan bangsa;
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, agar terwujud kehidupan yang harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan umat beragama, yang mampu melayani seluruh umat beragama yang tidak hanya untuk umat atau golongan tertentu saja;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, agar tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat;
5. Meningkatkan Pendidikan agama dan keagamaan, raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan, agar terwujud pelayanan pendidikan yang merata, bermutu,



dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa dan mampu meningkatkan tata kelola pendidikan agama dan keagamaan;

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, agar terwujud penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional, dan harus mampu menjamin akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor : H. Abrar Munanda, M.Ag
2. Kasubag Tata Usaha : H. Zulfikar, S.Ag
3. Kasi Pendidikan Madrasah : Hilaluddin, Spdl
4. Kasi Pend. Diniyah dan Pontren : Drs.H.Tamrin, M.Ag
5. Kasi Pendidikan Agama Islam : H. Idrial, S.Pd
6. Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah : Tri Andriani Djusair, S.Ag
7. Kasi Bimbingan Masyarakat Islam : Drs. Gazali
8. Penyelenggara Syariah : Hj. Misra Elfi, S.Ag

E. Sistem Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap Triwulannya dalam tahun berjalan dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua



rangkaian yang telah dilakukan setiap Triwulan tahun berjalan, sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada bulan berikutnya.

Dalam menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi ini menyampaikan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan 1 Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan perjanjian/ penetapan kinerja yang ditargetkan pada tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan ini akan diketahui masalah atau kendala demi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rician sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dan struktur organisasi



dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja harus sesuai dengan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Kemudian realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 1 Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa datang.





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana sudah disebutkan diatas bahwa berdasarkan PMA 13 Tahun 2012 Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan bidang keagamaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kota Bukittinggi;
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama, pendidikan agama dan bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
4. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan Raudhatul Athfal, madrasah, pendidikan agama dan keagamaan serta pondok pesantren;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program dan;
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kota Bukittinggi.



Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Renstra Kementerian Agama 2015-2019
2. Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi 2015-2019
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
4. Rencana Kerja Tahun 2019

Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat 1 (satu) bidang yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama yaitu bidang (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu : *“Terwujudnya Masyarakat Kota Bukittinggi Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera, Lahir Batin, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”* dengan melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama dengan dilakukan melalui empat fokus agenda prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Keempat fokus prioritas pembangunan bidang agama di atas juga didukung oleh:

- (a) peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang Agama
- (b) peningkatan sistem informasi dan pelayanan publik;
- (c) peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang agama;
- (d) peningkatan pendidikan dan pelatihan; dan



(e) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L).

Dalam rangka mencapai tujuan bidang Agama dan Pendidikan yang menjadi tugas Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, maka telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan.

Arah kebijakan Kementerian Agama juga terkait erat dengan sasaran strategis nasional bidang pendidikan yang diarahkan kepada peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat. Selaras dengan sasaran strategis nasional bidang agama dan pendidikan, kebijakan Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan kepada 5 hal pokok :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi Agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan;
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Agama Tahun 2015-2019, yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2019, maka Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2019 sebagai berikut:



A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Kementerian Agama yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Kementerian Agama beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan Presiden kepada Kementerian Agama.

Penyusunan Renstra Kementerian Agama mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Pendidikan dan bidang Kesejahteraan Rakyat. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antar unit-unit di bawah Kementerian Agama. Secara ringkas substansi Renstra Kementerian Agama dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Didalamnya memuat 7 aspek yang menjadi fokus pembangunan bidang agama, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan;
3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
5. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



Perencanaan strategis menentukan kemana arah suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran. Secara umum rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Adapun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memuat:

1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kota Bukittinggi Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera, Lahir Batin, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini sejalan dengan visi Kemenag *“Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera, Lahir Batin, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2015-2019 mengemban 7 (tujuh) misi yang dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;



- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

3. Tujuan

Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi adalah **“Terwujudnya masyarakat Kota Bukittinggi yang beragama, maju, sejahtera, dan cerdas, serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

4. Sasaran

Sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran strategis nasional, dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan serta berdasarkan atas tujuan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada, dan sinergi dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menetapkan dan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai selama periode tahun 2015-2019, bidang



yang diprioritaskan, yaitu : kehidupan beragama dalam meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien dan transparan, kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

a. Bidang Kehidupan Beragama

Dalam pembangunan bidang Agama, masyarakat Kota Bukittinggi selalu bepegang teguh kepada landasan ideologi pembangunan bangsa, yaitu nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan penegasan terhadap peran Agama dalam rangka mengisi pembangunan.

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah memberikan dorongan dan bantuan dalam berbagai kegiatan keagamaan. Selain memberikan dukungan berbagai kegiatan keagamaan, pada tahun 2011 Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (*Gemmar Mengaji*) dan tetap berjalan hingga kini. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali tradisi masyarakat Indonesia, yakni mengaji Al-Qur'an selepas Maghrib yang kini telah banyak ditinggalkan.

Sebuah pemahaman yang baik perlu dibuktikan di dalam kehidupan nyata dalam bentuk pengamalan ajaran agama. Agama akan memberikan peran yang positif terhadap pembangunan ketika pemahaman dan pengamalan para pemeluk ajaran agama terus menerus mengalami perbaikan kualitasnya.

Dalam pembangunan bidang Agama, masyarakat Kota Bukittinggi selalu berpegang teguh kepada landasan ideologi pembangunan bangsa,



yaitu nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan penegasan terhadap peran Agama dalam rangka mengisi pembangunan.

Ada 6 (enam) kerangka dasar yang melandasi implementasi pembangunan bidang Agama di Kota Bukittinggi, yaitu :

1. Pembangunan nilai-nilai agama dan budaya luhur sebagai spirit

Pembangunan bidang agama diintegrasikan melalui nilai budaya, adat dan etika dalam proses pembangunan ke depan dalam falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

2. Berbasis Partisipasi Masyarakat

Pembangunan bidang agama diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat yang beragama guna memenuhi kebutuhan spritual dan moral etikanya, oleh karena itu dilaksanakan atas dasar partisipasi masyarakat Agamis.

3. Berorientasi pada kemandirian yang tinggi

Pembangunan bidang agama berpijak pada prinsip kemandirian yang tinggi di tingkat lembaga keagamaan karena bertumpu kepada partisipasi masyarakat Agamis.

4. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, keadilan dan kesetaraan

Pembangunan di bidang agama menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, keadilan dan kesetaraan dengan mengedepankan tata nilai keluhuran agama yang tinggi kepada seluruh masyarakat di Kota Bukittinggi

5. Berwawasan kebangsaan

Pelaksanaan pembangunan agama di Kota Bukittinggi memiliki nilai wawasan kebangsaan yang selaras dengan muatan nilai-nilai keluhuran agama sehingga tercipta kehidupan beragama yang ideal.



6. Menjunjung Tinggi 5 Nilai Budaya Kerja

Prilaku Aparat Sipil Negara yang menjadi pelaksana pembangunan bidang agama di Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi haruslah menjunjung tinggi **5 Nilai Budaya Kerja (Integritas, Profesional, Inovasi, Tanggungjawab dan Keteladanan)**.

Sasaran strategis dalam bidang kehidupan beragama dapat dilihat dengan terwujudnya suatu kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional, yang ditandai dengan, antara lain:

- 1) Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat beragama yang seimbang, moderat dan inklusif.
- 2) Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional.
- 3) Menurunnya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan Agama.
- 4) Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika.
- 5) Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa.
- 6) Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmonisasi antar peradaban.
- 7) Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan.
- 8) Menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.



- 9) Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama.
- 10) Meningkatnya peran dan kualitas penyuluh agama.
- 11) Meningkatnya pelayanan administrasi keagamaan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).
- 12) Meningkatnya sumber informasi keagamaan
- 13) Meningkatnya kualitas bimbingan dan konsultasi keagamaan
- 14) Berkembangnya pusat-pusat kajian keagamaan
- 15) Meningkatnya pembinaan keluarga sejahtera, dan;
- 16) Meningkatnya partisipasi lembaga sosial keagamaan sebagai agen pembangunan Nasional.

b. Bidang Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah Kota khususnya Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari kalangan masyarakat dan pelajar.

Sasaran strategis bidang kerukunan umat beragama dapat dilihat dengan terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional yang ditandai dengan, antara lain:

- 1) Meningkatnya dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.



- 2) Meningkatnya peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia Internasional.
- 3) Meningkatnya harmoni intern dan antar umat beragama.
- 4) Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Kabupaten/Kota.
- 5) Berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan multikultural, gender, dan HAM.
- 6) Tersedianya program siaga dini pencegahan konflik umat beragama.

c. Bidang Raudhatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Sasaran strategis bidang raudhatul athfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa, yang ditandai dengan, antara lain:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini berbasis keagamaan yang bermutu (RA, BA, TA, TPA, TPQ dan sejenisnya);
- 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pesantren Salafiyah Ula dan Pesantren Salafiyah Wustha yang bermutu;
- 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Aliyah (MA) dan pesantren salafiyah ulya bermutu;
- 4) Terwujudnya Madrasah Aliyah bertaraf internasional;
- 5) Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- 6) Tersedianya Ma'had Aly pada pondok pesantren;



- 7) Tersedianya layanan pendidikan nonformal (Paket A, B, dan C) serta pendidikan vokasional pada pondok pesantren;
- 8) Meningkatnya mutu pengelolaan dan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah;
- 9) Meningkatnya mutu pendidikan agama di sekolah;
- 10) Meningkatnya mutu, profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 11) Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- 12) Terwujudnya pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat;
- 13) Tersedianya layanan pendidikan madrasah satu atap dan pesantren terpadu di wilayah perbatasan atau daerah khusus;
- 14) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Ada beberapa permasalahan yang ditenggarai menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan, diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta, dapat menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standarisasi pendidikan;
- 2) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;
- 3) Masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan yang profesional;



- 4) Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan;
- 6) Masih terdapat kesenjangan antar lembaga pendidikan agama dan pendidikan umum;
- 7) Mayoritas lembaga pendidikan di bawah binaan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berstatus swasta dengan daya dukung yang sangat terbatas;
- 8) Masih belum ada standarisasi yang memadai dalam menyusun kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan;
- 9) Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP pendidikan agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.

d. Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sasaran strategis penyelenggaraan ibadah haji adalah tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat, yang ditandai dengan, antara lain:

- 1) Terwujudnya jemaah haji mandiri;
- 2) Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif;
- 3) Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen pelayanan haji;
- 4) Terwujudnya sistem informasi yang handal;



- 5) Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji;
- 6) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai;
- 7) Meningkatnya pengelolaan dana haji.

Adapun permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, antara lain:

- 1) Pola rekrutmen dan pelatihan petugas haji belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pelayanan;
- 2) Pelayanan penyelenggaraan haji belum sepenuhnya memperhatikan profil jama'ah yang beragam dari segi latar belakang, usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya;
- 3) Masih lemahnya kontrol dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya berkaitan dengan pelayanan pendaftaran, transportasi, bimbingan, kesehatan, keamanan, dan perlindungan jama'ah;
- 4) Profil jama'ah haji yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya;
- 5) Perbedaan kondisi geografis, sosial budaya, adat istiadat dan bahasa merupakan kendala tersendiri bagi petugas haji.

e. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran strategis bidang tata kelola pemerintahan adalah terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional, yang ditandai dengan:

- 1) Terwujudnya reformasi birokrasi secara menyeluruh;



- 2) Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat dengan siklus minimal 5 (lima) tahunan;
- 3) Terwujudnya laporan keuangan Kementerian Agama dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- 4) Terwujudnya struktur organisasi instansi pusat dan instansi vertikal Kementerian Agama yang sesuai dengan tuntutan perkembangan;
- 5) Menurunnya jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal;
- 6) Meningkatnya recovery, revaluasi, pemanfaatan, dan kualitas pengelolaan aset;
- 7) Terbangunnya rintisan *e-government* dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan;
- 8) Meningkatnya kualitas aparatur sumberdaya manusia melalui sistem rekrutmen, penempatan dan pembinaan yang profesional;
- 9) Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien;
- 10) Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai basis kebijakan;
- 11) Terbangunnya citra positif Kementerian Agama sebagai institusi Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Ada sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, antara lain:

- 1) Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;



- 2) Kapasitas dan profesionalisme sebagai aparatur masih rendah;
- 3) Kesulitan koordinasi, pengendalian dan pengawasan akibat struktur organisasi yang besar dan jangkauan geografis yang luas;
- 4) Masih terbatasnya kapasitas manajerial pengelolaan Barang Milik Negara.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama Triwulan II tahun 2019, adalah sebagai berikut :

A. Dalam membuat program Bimbingan Masyarakat Islam, ada beberapa sasaran strategis yang direncanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi diantaranya :

1. Untuk meningkatkan Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah, ada beberapa rencana yang akan diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi diantaranya :

- a) pembinaan bagi penghulu untuk membentuk penghulu yang profesional dan berintegritas dengan melakukan pembinaan bagi penghulu (PNBP) melalui Sosialisasi Regulasi Kepenghuluan sebanyak 11 orang;
- b) peningkatan kualitas manajemen kelembagaan KUA yang memenuhi standar pelayanan minimal (rapat dalam kantor diluar jam kerja koordinasi dan evaluasi kelembagaan KUA, bimtek peningkatan layanan KUA berbasis IT , jasa profesi dan transport penghulu serta supervisi dan pengelolaan PNBP) dengan volume 12 lokasi dalam waktu 1 tahun;



- c) melakukan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA kecamatan Guguk Panjang dengan volume 1 lokasi;
 - d) melakukan bimbingan perkawinan pra nikah calon pengantin (BERKAH) dan bimbingan perkawinan pra nikah remaja usia nikah yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun.
2. Untuk peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat dan wakaf, maka akan diberikan Bantuan Operasional BWI perwakilan kabupaten/kota, Bantuan Operasional BAZNAS kabupaten/kota, Akreditasi Lembaga Zakat, Pengamanan Aset Wakaf berupa pembuatan legalitas/sertifikat harta benda wakaf dengan volume 1 lokasi selama tahun anggaran 2019.
 3. Dalam mewujudkan pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam telah direncanakan beberapa kegiatan berupa:
 - a. Tunjangan bagi penyuluh Agama Islam Non-PNS sebanyak 24 orang;
 - b. Pembinaan dan peningkatan kompetensi Penyuluh Agama Islam berupa pemilihan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama islam PNS dan Non PNS/PAH Kabupaten/kota sebanyak 24 orang;
 - c. Mengikuti Musabaqah al-Qur'an dan al-Hadits tingkat kabupaten/kota dengan volume kegiatan 1 kali, berupa transpor pendamping kafilah Kota pada MTQ tingkat Nasional selama Tahun Anggaran 2019 sebanyak 3 orang;



- d. Memberikan pembinaan SDM pengurus berupa bantuan lembaga/ormas Islam Kabupaten/Kota sebanyak 1 paket, serta pemberian bantuan Majelis Taklim Kabupaten/Kota dengan jumlah 4 paket.
4. Untuk mewujudkan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berencana untuk melakukan kegiatan berupa Pengelolaan Jadwal Sholat dan Imsakiyah dengan melakukan Rukyatul Hilal dan kalibrasi Kiblat selama dalam anggaran tahun 2019, kemudian melakukan penyelesaian konflik keagamaan melalui advokasi penanganan konflik aliran paham keagamaan bermasalah dengan volume 1 tahun.
5. Salah satu implementasi dari pencapaian *good governance* adalah dengan adanya perbaikan kinerja dari aparatur pemerintahan itu sendiri. Sebagai kompensasinya diberikan tunjangan kinerja dimana besarnya ditentukan dengan *grade* atau level, tergantung kepada beban kerja dari pegawai itu sendiri. Untuk tercapainya sasaran strategis yaitu dalam rangka pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada Bimas Islam, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merencanakan untuk terlaksananya pelayanan perkantoran dengan pemberian tunjangan dan gaji bagi Aparatur Sipil Negara dalam tahun anggaran 2019, serta Operasional dan pemeliharaan Perkantoran Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditargetkan selama tahun anggaran 2019.



B. Pada Triwulan II Tahun 2019 ini Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dalam hal ini Bagian Pendidikan Islam (Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam dan Seksi PD Pontren) mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan beberapa Sasaran Strategis yang telah diberikan diantaranya :

1. Dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memberikan tunjangan profesi kepada Guru PAI Non PNS sebanyak 25 orang, pemberian penghargaan bagi siswa/mahasiswa, Guru dan pengawas PAI yang berprestasi sebanyak 5 orang dan pemberian tunjangan profesi kepada guru PAI selama 1 tahun.
2. Dalam meningkatkan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melaksanakan kegiatan berupa :
 - a. Layanan Manajemen Madrasah dan RA dengan melakukan safeguarding BOS, PIP, dan BOP Madrasah kemudian monitoring dan evaluasi dengan target 2 dokumen selama 1 tahun;
 - b. Pelaksanaan UAMBN PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah selama 1 tahun dengan target 1 dokumen;
 - c. Selain itu juga direncanakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik untuk siswa MI dengan jumlah siswa 725 orang, bagi siswa madrasah MTs diberikan sebanyak 406 orang dan untuk MA direncanakan pemberian kepada siswa sebanyak 171 orang siswa;



- d. Pemberian Bantuan BOP bagi siswa RA sebanyak 191 orang dalam kurun waktu 1 tahun;
 - e. Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan Madrasah dengan melakukan kegiatan MENGAJI (Mengasah Jati Diri Indonesia) melalui Penyelenggaraan Kegiatan KSM Tk.Kota dengan target 1 layanan selama tahun anggaran 2019.
3. Dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan madrasah, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memberikan tunjangan Fungsional bagi Guru Non-PNS sebanyak 95 orang, pemberian tunjangan profesi bagi Guru Non-PNS sebanyak 30 orang serta pemberian gaji dan tunjangan profesi guru PNS RA/MIN dan pengawas Madrasah selama tahun anggaran 2019;
 4. Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Madrasah. Dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya layanan dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pada pendidikan Islam dengan volume 12 layanan, serta Layanan perkantoran berupa gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahun anggaran 2019.
- C. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
1. Dalam proses pembinaan Administrasi Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mengarahkan pada pembinaan aparatur yang



- profesional, netral, sejahtera dan kredibel yang berupaya menggali secara mendasar potensi SDM yang dimiliki melalui Pembinaan dan pengembangan SDM dan Layanan Kesejahteraan Sosial dengan volume 1 kegiatan dalam tahun Anggaran 2019;
2. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembinaan administrasi keuangan dan BMN. Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memberikan Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara selama Tahun Anggaran;
 3. Untuk terlaksananya Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melakukan Layanan Manajemen Organisasi berupa koordinasi penyelesaian hasil pengawasan dan pengendalian internal berupa kegiatan rapat-rapat dan perjalanan dinas selama tahun anggaran 2019;
 4. Dalam mewujudkan Pembinaan Administrasi Perencanaan, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berencana melakukan kegiatan penyusunan rencana program dengan volume 1 kegiatan dalam tahun anggaran 2019;
 5. Untuk mewujudkan system kepegawaian yang *unifed* dalam arti semua layanan kepegawaian yang didukung kebijakan norma dan standar pelayanan dalam meningkatkan kualitas administrasi umum, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mempunyai 2 indikator kinerja yaitu :



- a) Indikator yang pertama yaitu rehabilitasi gedung dan bangunan dengan volume 1 unit;
 - b) Layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran berupa pemeliharaan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, langganan daya dan jasa dan operasional perkantoran dan pimpinan selama Tahun Anggaran 2019;
6. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tentang peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memiliki 3 indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran 2019 yaitu :
- a. Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama dengan volume 1 kegiatan;
 - b. Operasional SEKBER FKUB kabupaten/kota berupa bantuan biaya operasional FKUB dengan volume 1 lokasi selama 1 tahun dalam tahun Anggaran 2019;
 - c. Pengembangan Kerukunan Umat Beragama berupa monitoring, evaluasi dan koordinasi kehidupan kerukunan umat beragama berupa dialog lintas agama dengan berbagai kalangan masyarakat dan profesi di tingkat Kecamatan dengan volume 1 dialog selama tahun anggaran 2019;
- D. Dalam rangka mewujudkan program penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merencanakan



beberapa sasaran strategis dalam tahun anggaran 2019 diantaranya:

1. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jama'ah Haji dalam meningkatkan kualitas dokumen pelayanan pendaftaran calon jama'ah haji, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berencana untuk memberikan pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji berupa:
 - a) Peningkatan dalam hal pelayanan pengurusan dokumen dan perlengkapan haji dengan volume 12 bulan selama tahun berjalan sebanyak 240 orang;
 - b) Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana berupa Koordinasi penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dengan melakukan Ngomong Masalah Haji (NGOPI) selama tahun anggaran 2019.
2. Dalam meningkatkan Pelayanan Pembinaan Haji, dengan sasaran meningkatkan petugas haji yang professional yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima, di tandai dengan :
 - a. persiapan rekrutmen petugas haji dan pelaksanaan seleksi petugas pendamping jama'ah haji di tingkat kab/kota sebanyak 40 orang;
 - b. kegiatan bimbingan jema'ah haji dengan melakukan manasik dan perjalanan haji kab/kota dengan volume 100 orang;



- c. serta sosialisasi dan penyuluhan kepada jema'ah haji/masyarakat dengan melakukan pemantauan dan pengawasan PPIU selama tahun anggaran 2019;
3. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan system informasi yang memadai dan tata kelola yang baik dan bersih, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merencanakan untuk pengelolaan layanan jaringan internet dan Intranet SISKOHAT tepat waktu selama tahun anggaran 2019.
4. Untuk meningkatkan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah, guna menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan bagi jama'ah haji, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyelenggarakan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta pembayaran gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara yang mengelolanya selama 1 Tahun Anggaran.
- E. Dalam rangka mewujudkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program Bimbingan Masyarakat Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi memberikan layanan perkantoran berupa Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara selama Tahun Anggaran 2019;
- F. Dalam rangka mewujudkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program Bimbingan Masyarakat Katolik, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merencanakan beberapa sasaran strategis dalam tahun



anggaran 2019 yaitu Layanan Perkantoran berupa Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dalam bentuk honor Aplikasi Keuangan selama Tahun Anggaran 2019 dan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran berupa Pembayaran Gaji dan Tunjangan Profesi bagi Aparatur Sipil Negara (Guru) selama tahun anggaran 2019.

Proses perencanaan anggaran dalam system anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penjaringan aspirasi masyarakat dan perencanaan strategis. Anggaran berbasis kinerja ini mengisyaratkan penggunaan dana yang tersedia dengan seoptimal mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat.

Pengendalian efektifitas dan efisiensi anggaran dapat tercapai dengan memperhatikan penetapan tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat yang jelas, serta kejelasan indikator kinerja. Oleh karena itu, untuk memotivasi pelaksana berperilaku efisien dan efektif, diperlukan penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja, dan penetapan harga satuan yang rasional.

Rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi adalah dokumen resmi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan bidang Agama untuk periode lima tahun ke depan (2015-2019). Pembangunan bidang agama sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis ini, mencakup mengenai kondisi yang diharapkan, formulasi kebijakan, program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Untuk lebih jelasnya lagi akan terlihat pada table berikut ini :



Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Tujuan: “Terwujudnya Masyarakat Kota Bukittinggi Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera, Lahir Batin, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	
Misi 1 : Sasaran Bidang Agama	
<p>Sasaran Strategis 1</p> <p>Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penghulu yang terbina 2. Jumlah KUA yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal 3. Jumlah Pembangunan Balai Nikah 4. Jumlah Bimbingan Perkawinan Pra Nikah
<p>Sasaran Strategis 2</p> <p>Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Operasional BWI 2. Bantuan Operasional BAZNAS 3. Akreditasi Lembaga Zakat 4. Pengamanan Aset Wakaf
<p>Sasaran Strategis 3</p> <p>Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS 2. Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas 3. Jumlah Penyelenggaraan Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadits 4. Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan
<p>Sasaran Strategis 4</p> <p>Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pengelolaan Hisab Rukyat 2. Penyelesaian Konflik Keagamaan



Sasaran	Indikator Kinerja Utama
<p>Sasaran Strategis 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam</p>	<p>1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan</p>
<p>Misi 2 : Meningkatkan kualitas madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.</p>	
<p>Sasaran Strategis 1 Peningkatan Mutu, dan Relevansi PAIS</p>	<p>1. Jumlah Guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan Profesi</p> <p>2. Jumlah Siswa/Mahasiswa, Guru dan Pengawas PAI yang berprestasi penerima penghargaan</p> <p>3. Jumlah Guru PNS PAI yang menerima tunjangan Profesi Guru</p>
<p>Sasaran Strategis 2 Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah</p>	<p>1. Jumlah Dokumen Layanan Manajemen Madrasah dan RA</p> <p>2. Jumlah Siswa MI penerima BOS</p> <p>3. Jumlah Siswa MTs penerima BOS</p> <p>4. Jumlah Siswa MA penerima BOS</p> <p>5. Jumlah Siswa RA Penerima BOP</p> <p>6. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui kegiatan MENGAJI</p>
<p>Sasaran Strategis 3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah</p>	<p>1. Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional</p> <p>2. Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi</p> <p>3. Jumlah Gaji dan Tunjangan Guru PNS dan Pengawas Madrasah</p>
<p>Sasaran Strategis 4</p>	



Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 2. Jumlah Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan
Misi 3: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah	
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya pelayanan Haji Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelayanan Dokumen dan Perlengkapan Jemaah Haji 2. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Petugas Haji yang Profesional 2. Jumlah Bimbingan Jama'ah Haji
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Layanan Perkantoran
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa	
Sasaran Strategis 1 Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Layanan Manajemen SDM



Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas pengelola Administrasi Keuangan dan BMN	1. Jumlah Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	1. Jumlah Layanan Manajemen Organisasi
Sasaran Strategis 4 Terlaksananya Pembinaan Kualitas Administrasi Perencanaan	1. Jumlah Layanan Perencanaan
Sasaran Strategis 5 Terlaksananya Pembinaan Kualitas Administrasi Umum	1. Rehabilitasi Gedung dan Bangunan 2. Jumlah Layanan Perkantoran
Sasaran Strategis 6 Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1. Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama berupa monitoring dan evaluasi kehidupan umat beragama 2. Jumlah Lokasi Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dialog Lintas Agama di Kecamatan
Misi 5 : Sasaran Bidang Bimas Kristen	
Sasaran Strategis 1 Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan
Misi 6 : Sasaran Bidang Bimas Katolik	



Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis 1 Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik	Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas



kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Jadi pada dasarnya Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk :



1. Mewujudkan komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta menjadi dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Menjadi dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Menjadi dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi telah membuat perjanjian kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. Oleh karena itu indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Kankemenag yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja tingkat Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2019 telah ditandatangani pada bulan januari tahun 2019.







BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, dalam rangka mewujudkan visi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.

Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik.

Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan banyak *stakeholders* lain.

Jadi, penerapan akuntabilitas ini, di samping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan.

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat menyelesaikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Berikut ini diuraikan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berdasarkan masing-masing Sasaran Program yang telah ditetapkan.



A. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi meliputi *Input* dan *Output*. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

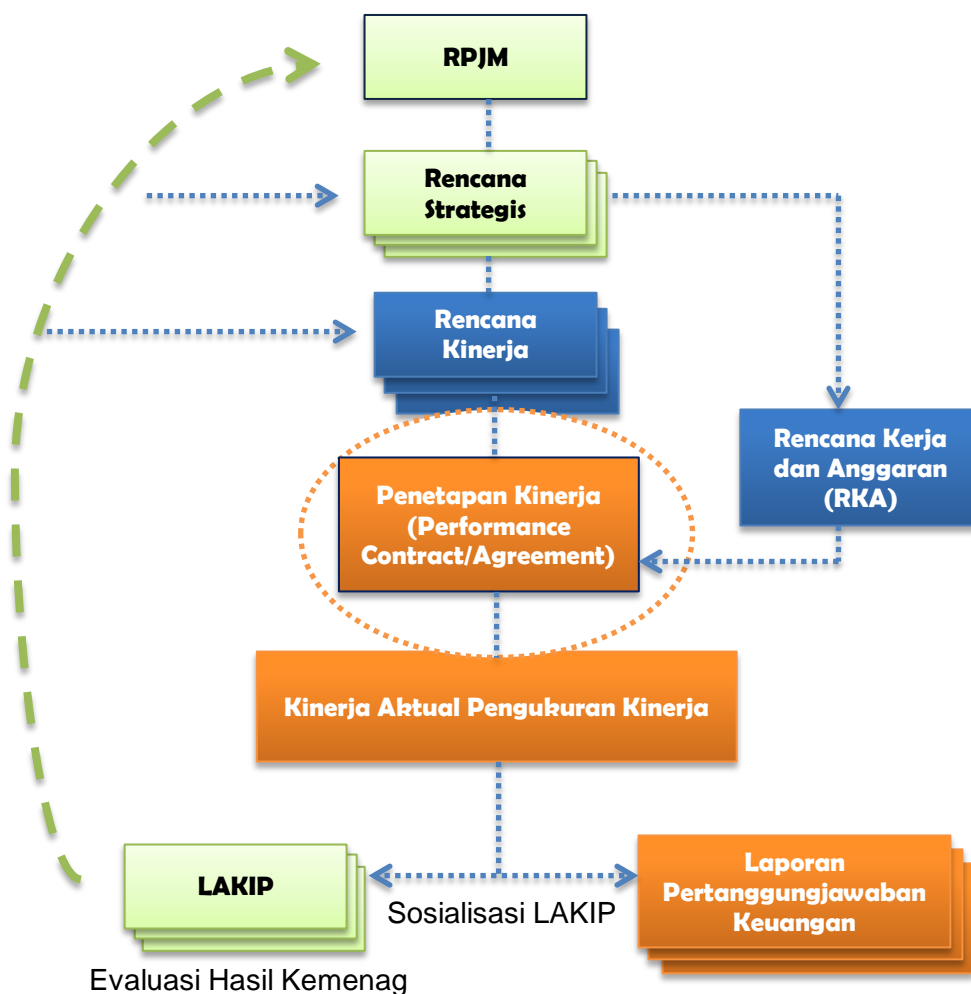
Indikator kinerja *Input* yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah (Rp.). Indikator *Input* lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data.

Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi bergantung dari *Output* yang dihasilkan. Indikator *Benefit* dan *Impact* diidentifikasi pada saat dilakukan analisis pencapaian sasaran.



Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategik. Dalam menetapkan indikator sasaran strategik, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.

Posisi Penetapan Kinerja Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari bagan di bawah ini :



Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut ke dalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut,



maka diajukan dan di setuju anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

B. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. Hal ini diperoleh dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas.

C. Pengukuran Kinerja

Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi berperan untuk menganalisis dan membantu memperbaiki masalah-masalah dalam pencapaian kinerja. Hasil kerja yang dicapai haruslah memberikan kontribusi yang penting bagi organisasi yang dilihat dari segi kualitas yang dirasakan oleh organisasi dan sangat besar manfaatnya pada masa yang akan datang. Pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai;



- Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya);
- Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Pengukuran kinerja bisa dilakukan dengan evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap system yang ada.

Namun demikian, evaluasi kadang-kadang tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan informasi yang dihasilkan oleh system informasi pada organisasi instansi saja. Data dari luar instansi akan menjadi sangat penting untuk digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi.

Penggunaan data dan informasi guna melakukan evaluasi lebih diprioritaskan pada kecepatan untuk memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan yang diperlukan untuk perbaikan akan segera dilakukan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2019 dengan realisasi yang sudah tercapai.

Tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan II tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam



Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya, Program Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat gambaran pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program Bimbingan Masyarakat Islam

Sasaran Strategis		Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1 Jumlah Penghulu yang Terbina	11 Orang	-	0
		2 Jumlah KUA yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	12 Lokasi	Honor Layanan Nikah bulan Juni	43
		3 Jumlah Pembangunan Balai Nikah	1 Lokasi	SBSN Pembangunan Balai Nikah dan perdin	7
		4 Jumlah Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	12 bulan	1 angkatan bulan mei	14
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	1 Jumlah Bantuan Operasional BWI	1 Lembaga	'-	'-
		2 Jumlah Bantuan Operasional BAZNAS	1 Lembaga	'-	'-
		3 Jumlah Akreditasi Lembaga Zakat	1 Lembaga	'-	'-
		4 Jumlah Pengamanan Aset Wakaf	10 Lokasi	'-	'-
3		1 Jumlah Tunjangan	24 Orang	Tunjangan Penyuluh	83



Sasaran Strategis		Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Penyuluh Agama Islam Non-PNS		Agama Islam Non-PNS bulan Mei	
		2 Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas	24 Orang	Kegiatan pembinaan penyuluh PAH dan PNS serta perdin dalam kota	36
		3 Jumlah Penyelenggaraan Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadits	1 Kali	'-	'-
		4 Jumlah Bantuan Ormas dan Lembaga Keagamaan Kab/Kota	4 Lembaga	4 Lembaga	100
4	Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1 Jumlah Pengelolaan Hisab Rukyat	20 Kali	'-	'-
		2 Penyelesaian Konflik Keagamaan	1 Kali	'-	'-
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 bulan	6 bulan	58

2. Seksi Pendidikan Agama Islam



Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya, Program Pendidikan Islam seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat di lihat gambaran pencapaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Program Pendidikan Islam

Sasaran Strategis		Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Mutu dan Relevansi PAIS	1 Jumlah Guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi	25 Guru	TPG PAI Non PNS hingga Juni	33
		2 Jumlah Siswa/Mahasiswa, Guru dan Pengawas PAI Berprestasi penerima penghargaan	5 Orang	5 Orang	100
		3 Jumlah Guru PNS PAI yang menerima tunjangan Profesi Guru	12 bulan	6 bulan	38
2.	Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah	1 Jumlah Dokumen Layanan Manajemen Madrasah dan RA	12 bulan	6 bulan transport money BOP RA	15
		2 Jumlah Siswa MI penerima BOS	725 Orang	MIS sebanyak 182 orang per-semester dan MIN sebanyak 549 hingga bulan Juni	35



Sasaran Strategis		Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		3 Jumlah Siswa MTs penerima BOS	406 Orang	Siswa MTsS 392 Orang semester 1	48
		4 Siswa MA penerima BOS	171 Orang	176 Orang Siswa MAS Semester 1	51
		5 Jumlah Siswa RA Penerima BOP	191 Orang	191 Orang	100
		6 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-
3	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	1 Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	95 Guru	Tunj.Insentif guru Non PNS hingga Juni	35
		2 Jumlah Tunjangan Profesi Guru Non-PNS	30 Guru	TPG Madrasah Non PNS hingga Juni	57
		3 Jumlah Gaji dan Tunjangan Guru PNS dan Pengawas	12 bulan	TPG PNS hingga bulan juni	29
4	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	12 Layanan	Kegiatan EMIS PAI	10
		2 Jumlah Layanan Perkantoran berupa Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor	12 Bulan	6 Bulan	84



3. Seksi Haji dan Umrah

Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya, Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat gambaran pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Program Penyelenggara Haji dan Umrah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya pelayanan Haji Dalam Negeri	Jumlah Pelayanan Dokumen dan Perlengkapan Jemaah Haji	240 orang	30 orang	7
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Penyelenggaraan Ibadah Haji	12 Bulan	12 Bulan	100
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Haji	Jumlah Petugas Haji yang Profesional	40 Orang	40 Orang	100
	Jumlah Bimbingan Jama'ah Haji	100 Orang	Kegiatan Pra manasik haji dan perdin	41
Meningkatnya Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu	Pengelolaan Layanan Jaringan Internet dan Intranet Siskohat	12 Bulan	'-	'-



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan	6 Bulan	51

4. Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat gambaran pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
(Sub.Bagian Tata Usaha)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	'-	'-
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan BMN	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan	'6 bulan	53
Meningkatnya	Jumlah Layanan Manajemen	1 Layanan	'-	'-



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Kualitas Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	Organisasi			
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Perencanaan	Jumlah Layanan Perencanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	76
Terlaksananya Pembinaan kualitas Administrasi Umum	1. Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	1 Unit	1 Unit	100
	2. Jumlah Layanan Operasional Perkantoran	12 Bulan	Pemeliharaan Gedung Kantor, Perbaikan peralatan kantor, Langganan Daya dan Jasa serta Operasional Perkantoran dan Pimpinan hingga bulan Juni	43
Program Kerukunan Umat Beragama				
Meningkatnya Kualitas Kerukunan Hidup Umat Beragama	Monitoring dan evaluasi kehidupan kerukunan umat beragama	1 Kegiatan	-	-
	Jumlah Lokasi Operasional SEKBER FKUB Kab/Kota	1 Lokasi	1 Lokasi	100



Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Jumlah Dialog Lintas Agama Di Kecamatan	1 Kegiatan	'-	'-

5. Bimbingan Masyarakat Kristen

Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasi pada Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat gambaran pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	6 bulan	34

6. Bimbingan Masyarakat Katolik

Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui pengukuran indikator pencapaian target dan realisasinya pada Bimbingan Masyarakat Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dapat gambaran pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
------------------	-------------------	--------	-----------	---



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Bimas Katolik	Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12 Bulan	Honor Operasional perkantoran hingga bulan Mei	42
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Profesi Guru PNS	12 Bulan	6 bulan	42

D. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan hasil evaluasi kinerja yang disampaikan oleh seorang pimpinan unit kerja Instansi Pemerintah adalah bentuk transparansi dari suatu organisasi tersebut. Untuk dapat bermanfaat sebagai input bagi perubahan dan perbaikan laporan sebaiknya disampaikan baik kepada pihak internal maupun eksternal organisasi. Selain sebagai instrument akuntabilitas, data dan informasi kinerja dapat dimanfaatkan oleh pimpinan organisasi yang lebih tinggi dan lembaga legislative sebagai input dalam pengambilan keputusan publik.

Pada lingkup manajemen pemerintahan, sedikitnya terdapat 5 macam penggunaan data dan informasi sebagai hasil kajian atau evaluasi program yaitu:

1. Instrumen transparansi dan akuntabilitas, sebagai bahan alat komunikasi yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik;
2. Perbaikan efisiensi alokasi anggaran, sebagai input bagi penganggaran berbasis kinerja, sehingga alokasi pendanaan berdasarkan pada fakta



kinerja pencapaian program yang fokus. Dengan demikian diharapkan proses penganggaran menjadi lebih efisien;

3. Input perbaikan dalam system manajemen organisasi;
4. Inovasi untuk reformasi/perbaikan pelayanan publik;
5. Input pengambilan keputusan publik.

Untuk melihat keberhasilan organisasi maka dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Evaluasi dan analisis dilakukan pada capaian indikator kinerja program dan efisiensi serta efektifitas kegiatan.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *Input*, *Output*, dan *Outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut.

Tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Agama Tahun 2019 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian indikator sasaran.



Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outputnya* 50% untuk triwulan II ini dan sebaliknya kegiatan dinyatakan kurang/tidak efektif apabila capaian rata-rata indikator *outputnya* dibawah 50%.

Berikut analisis capaian tabel diatas :

Tabel 3.1 di atas menggambarkan bahwa capaian dari outcomes sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan ada yang melebihi dari target dan ada yang belum teralisasi sehingga realisasi yang dicapai pada Triwulan II ini kurang dari 50 % yaitu sebesar 47 %.

Selain anggaran pada Bimas Islam ini masih ada yang berbintang, namun ada beberapa indikator yang sudah dicairkan melebihi 50 % diantaranya bantuan ormas dan lembaga keagamaan Kabupaten/kota dan pembayaran tunjangan penyuluh agama Islam Non PNS bulan Mei.

Dalam data yang diperoleh terhadap penyuluh agama terdapat indikasi adanya peningkatan bimbingan atau kepenyuluhan, keberhasilan ini didukung pelaksanaan tugas kepenyuluhan diantaranya :

- Tingkat pendidikan para penyuluh agama Islam Non PNS sebagian besar adalah sarjana.
- Terdapat seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi tertulis.
- Ketersediaan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepenyuluhan bagi masyarakat.

Selain itu kegiatan pembinaan penyuluh PAH dan PNS serta Perdin dalam kota juga telah dibayarkan, namun indikator yang mendukung pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat dan wakaf belum terealisasi karena pagu masih berbintang dan pengelolaan hisab ruyat pun belum terealisasi karena laporan perjalanan dinas belum keluar. Sehingga dapat dikatakan sasaran pada Program Bimbingan Masyarakat Islam Triwulan II belum terlaksana dengan baik dan efektif.



Tabel 3.2 di atas menggambarkan bahwa capaian dari outcomes sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan pada Triwulan II ini melebihi dari 50 %, hal ini dapat dilihat dari telah terlaksananya beberapa indikator dan kegiatan yang ditargetkan pada tahun anggaran 2019 ini. Diantaranya dengan telah dibayarkannya TPG Guru PAI Non PNS hingga bulan Juni, pemberian penghargaan bagi siswa/mahasiswa, guru dan pengawas PAI yang berprestasi, TPG Madrasah dan TPG PNS dan pengawas yang telah dibayarkan hingga bulan Juni.

Kegiatan pembinaan dan koordinasi pada seksi Pendidikan Agama Islam telah dilakukan berupa NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam) PAIS semester 1 dan pendataan *Education Management Information System* (EMIS). Begitu juga dengan bagian pendidikan dan pondok pesantren juga telah dilakukan NGOPI untuk 4 (empat) bulan pertama.

Namun ada guru yang masih belum menerima tunjangan sertifikasi disebabkan karena guru tersebut belum menerima SKBK (surat keterangan beban kerja) dan SKMT (surat keterangan melaksanakan tugas) dari aplikasi SIMPATIKA (sistem informasi dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan pada kementerian agama) karena sistem belum menerbitkan

Selain itu ada beberapa indikator yang tetap melaksanakan kegiatan walaupun tidak memiliki dana bahkan ada juga kegiatan yang tetap dilakukan dengan dana yang kurang memadai, hal ini dapat di lihat dari kegiatan pada Pondok Pesantren.

Pada siswa penerima dana BOS baik tingkat MI, Mts dan MA swasta diberikan setengah dari anggaran karena pembayaran dana BOS diberikan setiap semester dari tahun berjalan, untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri juga telah



dibayarkan hingga bulan Juni, khusus untuk Siswa RA penerima BOP diberikan seluruhnya sesuai dengan anggaran yang diberikan.

Kemudian ada beberapa indikator yang belum terealisasi secara sempurna yang menyebabkan Layanan Administrasi Perencanaan dan Sistem pada seksi Pendidikan Agama Islam belum terlaksana secara menyeluruh. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan program Pendidikan Islam pada seksi Pendidikan Agama Islam telah terealisasi sebesar 55 %.

Tabel 3.3 di atas menggambarkan bahwa capaian dari outcomes sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan hampir mencapai 50 %, hal ini di dukung dengan sudah terlaksananya kegiatan rekrutmen petugas haji tahun 2019 dan pelaksanaan kegiatan pra manasik haji serta perjalanan dinas, sehingga dapat dikatakan sasaran pada Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Triwulan II ini sudah terlaksana dengan baik dan efektif dengan pencapaian sebesar 49 %

Tabel 3.4 di atas menggambarkan bahwa capaian dari outcomes sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan sudah melebihi 50%, diantaranya pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan peralatan kantor serta pembayaran gaji dan tunjangan ASN hingga bulan Juni.

Dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, Kantor Kementerian Agama Kota bukittinggi memberikan bantuan operasional SEKBER FKUB Kabupaten/kota, juga melakukan kegiatan dialog lintas agama yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kerukunan hidup umat beragama di Kota Bukittinggi.

Namun ada beberapa indikator yang belum terlaksana pada triwulan II ini, yang disebabkan karena jadwal realisasi anggaran yang terencana dilaksanakan



pada semester II. Sehingga dapat dikatakan sasaran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Sub.Bagian Tata usaha telah terlaksana dengan baik dan efektif. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Sub Bagian Tata Usaha terealisasi sebesar 52 %.

Table 3.5 di atas menggambarkan bahwa capaian outcomes sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan belum mencapai 50%, sehingga dapat dikatakan sasaran pada program pembinaan Bimas Kristen belum terlaksana dengan baik dan efektif, hal ini disebabkan karena gaji dan tunjangan serta sertifikasi guru baru dilaksanakan untuk 6 bulan pertama,. Sehingga secara keseluruhan dapat dilihat bahwa program Bimbingan Masyarakat Kristen triwulan II terealisasi sebesar 34%.

Table 3.6 di atas menggambarkan bahwa capaian outcomes sasaran persentase dari seluruh sasaran yang ditargetkan belum mencapai 50%, sehingga dapat dikatakan sasaran pada program pembinaan Bimas Katolik Triwulan II belum terlaksana dengan baik dan efektif.

Hal ini terlihat dari indikator pembayaran honor operasional perkantoran baru dibayarkan hingga bulan mei, sementara itu gaji dan tunjangan bagi Guru PNS telah dibayarkan hingga bulan juni, sehingga dapat dilihat secara keseluruhan program Bimbingan Masyarakat Kristen triwulan II terealisasi sebesar 42%.

E. Akuntabilitas Keuangan

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.



Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertical. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban dana publik;
2. Penyajian tepat waktu ;
3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Dalam Tahun Anggaran 2019 berdasarkan DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **21.830.626.000,-** sedangkan realisasinya Rp. **11.260.166.484,-**. Dengan persentase sebesar **52%**.

Secara rinci alokasi anggaran menurut program dan realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp000)	Realisasi	
			(Rp000)	%
		2.213.954.000	1.154.710.400	52



No	Program	Pagu (Rp000)	Realisasi	
			(Rp000)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama			
2	Bimbingan Masyarakat Islam	7.626.198.000	3.603.768.209	47
3	Pendidikan Islam	11.069.430.000	6.094.458.449	55
4	Bimbingan Masyarakat Kristen	232.188.000	79.160.780	34
5	Bimbingan Masyarakat Katolik	118.484.000	49.682.982	42
6	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	570.372.000	278.385.664	49
Jumlah		21.830.626.000	11.260.166.484	52

Berdasarkan program, anggaran Kementerian Agama tahun 2019 dialokasikan untuk 6 (Enam) Program. Anggaran terbesar Kementerian Agama dialokasikan pada Program Pendidikan Islam yang digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan.

Anggaran terbesar kedua dialokasikan pada Program Bimbingan Masyarakat Islam yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan pada



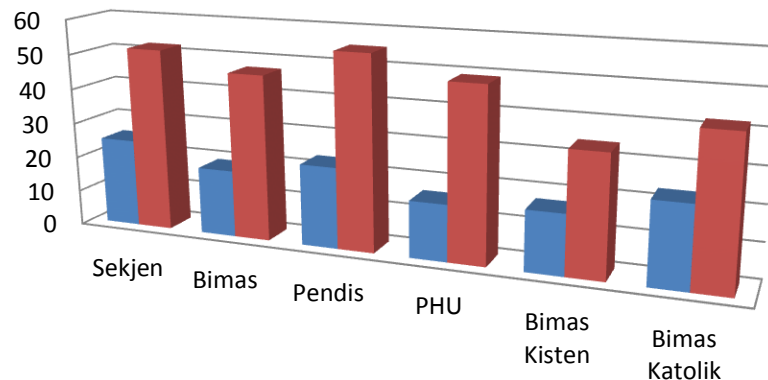
seksi Bimas Islam dan operasional 3 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, penyuluhan agama, dan pembinaan keagamaan lainnya.

Jika kita lihat perbandingan realisasi anggaran antara triwulan I dengan triwulan II dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Program	Pagu	Realisasi TW I		Realisasi TW II	
		(Rp.00)	(Rp.00)	%	(Rp.00)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.213.954.000	552.654.672	25	1.154.710.400	52
2	Bimbingan Masyarakat Islam	7.626.198.000	1.471.794.553	19	3.603.768.209	47
3	Pendidikan Islam	11.069.430.000	2.577.030.373	23	6.094.458.449	55
4	Bimbingan Masyarakat Kristen	232.188.000	35.995.728	16	79.160.780	34
5	Bimbingan Masyarakat Katolik	118.484.000	19.768.080	17	49.682.982	42
6	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	570.372.000	129.326.568	23	278.385.664	49
Jumlah		21.830.626.000	4.786.569.974	22	11.260.166.484	52



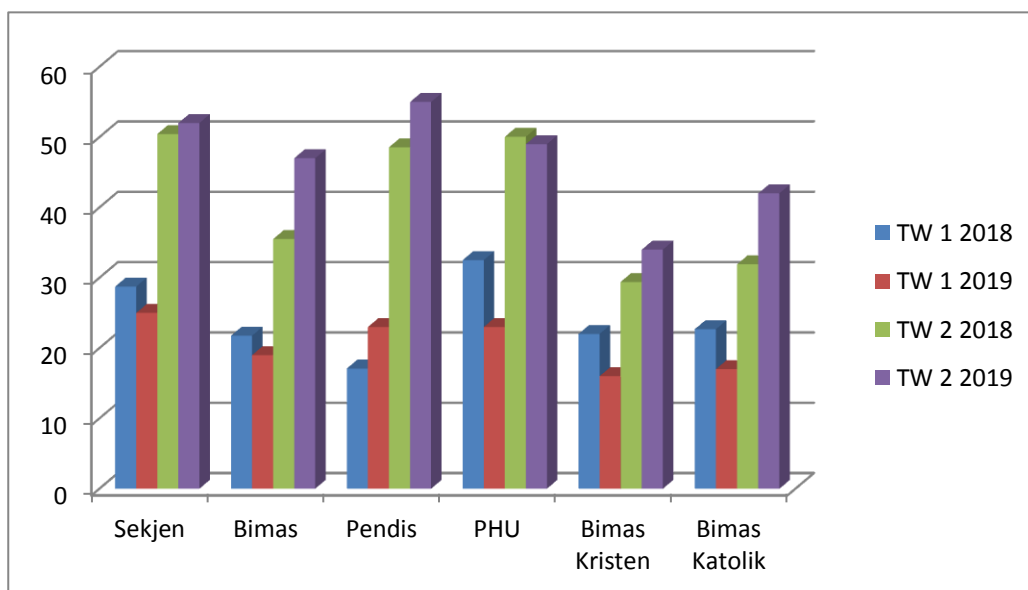
Perbandingan realisasi anggaran triwulan 1 dan triwulan 2



	Sekjen	Bimas	Pendis	PHU	Bimas Kisten	Bimas Katolik
■ Triwulan 1	25	19	23	16	17	23
■ Triwulan 2	52	47	55	49	34	42

Jika dilihat dari diagram diatas terlihat realisasi anggaran masing-masing satker terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena pada umumnya masing-masing indikator telah terlaksana pada bulan yang ditargetkan.

Jika dilihat dari tahun sebelumnya pada triwulan II tahun 2018 dan triwulan II tahun 2019, pada tahun ini terjadi peningkatan realisasi anggaran, seperti pada diagram di bawah ini :





Pada tahun 2019 ini terjadi peningkatan serapan anggaran dan kinerja yang dilakukan oleh SDM yang mengelola keuangan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa fungsi pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2019 ini secara administrasi berjalan dengan baik, sehingga pada triwulan II ini semua indikator dapat tercapai dengan baik. Hal ini juga didukung dengan adanya kontrol yang baik terhadap pengelolaan anggaran dari setiap pejabat pembuat komitmen maupun pimpinan unit kerja sebagai penanggung jawab anggaran.

Indikator kinerja nilai reformasi birokrasi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2018 memperoleh capaian sebesar 95,83 %, yang berdampak dengan kinerja SDM di tahun berikutnya. Hal ini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2018 menerapkan beberapa langkah yaitu :

(a) Perbaikan berkelanjutan. Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus menerus, melalui siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan, dan (b) Dokumentasi. Seluruh proses pelaksanaan reformasi birokrasi harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta melakukan perbaikan.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agama Triwulan II tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan sebagai tindak lanjut dari KMA Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terkait dengan esensi dari tujuan akuntabilitas, insentif dalam pengakuan kredibilitas dan peningkatan kepercayaan (*trust*) dari para *stakeholder* merupakan hal yang terpenting. Pelaporan kinerja merupakan alat sosialisasi terhadap kinerja positif yang telah dicapai untuk mendapatkan apresiasi masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Triwulan II tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2019 untuk Triwulan II ini telah sepenuhnya tercapai 50%, karena kegiatan yang telah direncanakan ada yang tepat waktu dan ada juga yang belum terlaksana pada Triwulan II (dua) ini.

Secara ringkas seluruh pencapaian kinerja yang terdiri dari program, kegiatan dan sasaran telah mencapai di atas 50 %. Namun demikian, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 50%, telah memberikan



pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerja pada Triwulan berikutnya.

Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja tahun 2019, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan suatu kegiatan;
2. Penyusunan perencanaan kegiatan khususnya dalam pemberian bantuan beasiswa miskin agar diperhitungkan biaya pengiriman kepada siswa penerima bantuan pada Triwulan berikutnya;
3. Penyusunan perencanaan kegiatan dilakukan seakurat dan secermat mungkin, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan kegiatan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
4. Pengusulan database bagi guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi tahun 2019 merupakan media dan bahan akuntabilitas tahun pertama untuk pelaksanaan Renstra 2015-2019. Namun demikian, Laporan Kinerja (LKj)



Triwulan II ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Publik di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi sehingga implementasi dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan akan lebih baik di masa mendatang.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi mengharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.